

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan akuntansi sektor publik juga semakin pesat. Warga negara sebagai salah satu pemangku kepentingan sudah semakin cerdas dan kritis, yang mana masyarakat selalu menuntut untuk adanya transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga – lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya, yang menggunakan akuntansi publik dalam pelaporannya (Safitri, 2019). Dalam kegiatan mengelola anggaran, akuntabilitas dan transparansi sangat penting dilakukan karena hasil akhir dari pengelolaan tersebut harus diberikan secara terbuka kepada publik serta dipertanggungjawabkan.

Dalam pemerintahan sendiri, untuk menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, terdapat beberapa peraturan terkait dengan akuntabilitas kinerja lembaga publik, yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sitta et al (2023) Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sehingga berbagai mekanisme pelaporan dan peraturan kelembagaan dapat dibuat lebih efektif dan efisien bertujuan untuk menghasilkan perubahan struktural untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). *Good governance* merupakan sebuah teori yang menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam teori ini, transparansi merupakan komponen utama dari tata kelola yang baik guna meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan. Selain itu, terdapat juga teori *Principal – Agent* yang

mana pada teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu *principal* yang mana dalam hal ini *principal* adalah masyarakat, dan *agent* adalah aparatur negara yang mengelola anggaran. Pada pelaksanaannya, transparansi sangat berperan penting karena dapat meminimalisir kesenjangan sebuah informasi diantara kedua pihak dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran oleh *agent*. Selain itu juga adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu dalam pengelolaan anggaran harus adanya akuntabilitas dan transparansi, yang mana pengelolaan anggaran yang baik adalah salah satu bentuk nyata dari perwujudan *Good Governance*.

Salah satu akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan adalah rawannya kasus penyalahgunaan anggaran atau kasus TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).



Gambar 1.1 Statistik Korupsi di Indonesia

Sumber: ICW dalam Brigitta Raras 2022

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp18,6 Triliun. Dan pada tahun 2021 terdapat 533 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp29 Triliun. Dan berdasarkan data diatas, terbukti penyalahgunaan anggaran menjadi kasus yang paling banyak digunakan oleh para koruptor dalam instansi pemerintah (Brigitta Raras, 2022).

Dalam pengelolaan anggaran, agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka dibutuhkan sebuah pengawasan yang baik. Pengawasan dapat dilakukan dari internal yaitu atasan secara langsung dan divisi yang dikhususkan melakukan pengawasan pada setiap divisi atau eksternal yaitu badan legislatif serta lembaga pengawas khusus yang dibentuk untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pengawasan dalam anggaran dibutuhkan untuk mengetahui perencanaan yang sudah disusun dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Penerapan akuntansi yang baik serta sistem pengawasan yang baik diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga berpengaruh terhadap kinerja instansi menjadi lebih optimal.

Berdasarkan program *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* yang merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola instansi pemerintah, dijelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan yang memadai, yang mana dalam pengawasan tersebut bukan hanya pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga termasuk identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan dengan efektif. Pada tahun 2020, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi berkolaborasi dengan Direktorat Koordinasi Supervisi KPK telah melakukan Diklat Probitas Audit ke seluruh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota, mengingat APIP memegang peran strategis sebagai sistem pengendalian intern pemerintah. Mengacu pada capaian MCP pada tahun 2021 terkait indikator APIP masih berada pada kisaran

25,58%, berdasarkan data tersebut terbukti bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan (Rizky, 2021).

Selain transparansi dan pengawasan, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian kinerja dalam sebuah instansi, yang mana pada setiap individu memiliki potensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan optimal (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022). Oleh karena itu pengelolaan SDM yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari sebuah instansi.

Kinerja anggaran perlu dijadikan sebagai salah satu poin penting yang diperhatikan dalam setiap instansi pemerintah. Terdapat beberapa akibat yang dapat timbul dari kurang memperhatikan kinerja anggaran yaitu, mulai dari realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah di rencanakan yang berdampak pada turunnya nilai capaian kinerja keseluruhan instansi tersebut, pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan tepat sasaran sehingga pelaksanaan anggaran yang tidak reliable dan realisasi anggaran yang tidak maksimal hingga munculnya kasus penyalahgunaan dana anggaran dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu yang menguji kinerja anggaran sebagai variabel dependen terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran yaitu menurut Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Nata et al (2023), Sitta et al (2023), Achmad et al (2020), Amin et al (2022), Rigian & Purnama Sari (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, lalu menurut Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Achmad et al (2020), Rigian & Purnama Sari (2019), menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, faktor lainnya adalah sistem pengukuran kinerja yang berpengaruh positif menurut (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022), dukungan organisasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran menurut (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022), kualitas anggaran yang berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dan menurut (Siregar 2019), perencanaan anggaran yang berpengaruh positif terhadap

kinerja anggaran menurut (Mantiri et al., 2018) dan teknologi informasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran menurut (Mantiri et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menguji transparansi terhadap kinerja anggaran, menurut Safitri (2019), Achmad et al (2020), Amin et al (2022), Rigian & Purnama Sari (2019), Zahra et al (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nata et al (2023), Sitta et al (2023), menyatakan bahwa transparansi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang menguji pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Sitta et al (2023), Amin et al (2022), menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rigian & Purnama Sari (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang menguji pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi & Cheria Puspita (2022), Siregar (2019), menyatakan bahwa faktor individual memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mantiri (2018), menyatakan bahwa faktor individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran.

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, maka peneliti melihat adanya gap penelitian antara transparansi, pengawasan, dan faktor individual terhadap kinerja anggaran, yaitu ditemukan adanya hasil yang inkonsisten atau kontradiksi pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Faktor Individual Terhadap Kinerja Anggaran pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara”**.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu instansi pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. BKN merupakan salah satu instansi

pemerintah yang mengatur dan mengawasi kebijakan kepegawaian dan semua urusan ASN, khususnya dalam penerimaan, pengadaan, pengembangan dan pemutusan hubungan kerja ASN. BKN menjadi sebuah instansi pemerintah yang menaungi seluruh ASN di Indonesia bahkan seluruh kementerian di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
3. Bagaimana pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, pengawasan dan faktor individual secara simultan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
2. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
3. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
4. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan dan faktor individual terhadap kinerja anggaran secara simultan pada Kantor Pusat BKN

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi tambahan di bidang kinerja anggaran pada instansi sektor publik khususnya dalam masalah transparansi, pengawasan dan faktor individu sehingga masyarakat menjadi semakin paham bahwa kinerja anggaran sangat penting. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya tentang kinerja anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai Kantor Pusat BKN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi bagi pegawai kantor pusat BKN dalam mengambil kebijakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kinerja anggaran, sehingga anggaran dapat tepat sasaran, dan dapat terhindar dari kasus – kasus yang dapat merugikan instansi dan negara

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kinerja anggaran, yang mana anggaran merupakan bagian dari akuntansi sektor publik sehingga masyarakat dapat lebih kritis mengenai kinerja anggaran dari instansi – instansi sektor publik.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi tambahan di bidang kinerja anggaran pada instansi sektor publik dan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya tentang kinerja anggaran.